

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kartayasa, Mansyur, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Kencana.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Buku Ajar, Makassar : Pustaka Pena.
- Hakim, Lukman, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Yogyakarta : Deepublish.
- Mertha, I Ketut, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hardani, 2020, *“Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish.
- Nur, Aco, 2016, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Jurnal

- Mukhlis R, “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, (<https://media.neliti.com/media/publications/9093-ID-keistimewaan-dan-kekhususan-aceh-dalam-perspektif-negara-kesatuan-republik-indon.pdf>), diakses tanggal 9 Desember 2020 pukul 17.18 WIB.
- La Sina, “Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsidi Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol 26 Nomor 1, Januari 2008,

(<http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1108/1075>), diakses tanggal 7 Januari 2021 pukul 18.03 WIB.

Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Humanus* Vol. XIV No. 1, 2015, (<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/download/5405/4283>), diakses tanggal 2 Februari 2021 pukul 18.56 WIB.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 Edisi I, Juni 2020, (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>), diakses tanggal 2 Februari 2021 pukul 19.43 WIB.

Nazir, “Tinjauan Yuridis tentang delik Berlanjut dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 3 Edisi 6, 2015, (<https://media.neliti.com/media/publications/147271-ID-none.pdf>), diakses tanggal 24 Maret 2021 pukul 19.45 WIB.

La Gurusi, “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)”, *Jurnal Hukum Volkgeist* Vol. 1 Nomor 2, April 2017, (<https://media.neliti.com/media/publications/276823-tinjauan-yuridis-pertimbangan-hakim-dala-e3586194.pdf>), diakses tanggal 1 April 2021 pukul 17.52 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Website

Fachrur Rozie, “Kronologi Tangkap Tangan Wali Kota Medan”, (<https://m.liputan6.com/news/read/4088082/kronologi-tangkap-tangan-wali-kota-medan>), diakses tanggal 9 Desember 2020 pukul 16.31 WIB.

Doffi Zanuardi, Ismail Navianto dan Milda Istiqomah, “Alasan Penghapusan Pidana bagi Korban yang Melakukan Tindak Pidana karena Dipaksa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, (<https://media.neliti.com/media/publications/35319-ID-alasan-penghapusan-pidana-bagi-korban-yang-melakukan-tindak-pidana-karena-dipaksa.pdf>), diakses tanggal 7 Januari 2021 pukul 17.32 WIB.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, “Modul Tindak Pidana Korupsi”, (<http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/0613ec24e6c3c19aa110a668ba0c8846.pdf>), diakses tanggal 11 Januari 2021 pukul 15.58 WIB.

Samhis Setiawan, “Pengertian Analisis Data”, (<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/>), tanggal 3 Februari 2021 pukul 19.41 WIB.

E. Sumber-sumber lainnya

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Mdn.

Kamus Besar Bahasa Indonesia KEMENDIKBUD

Kamus Hukum PT Kendari